

**KEWENANGAN PEMERINTAH
DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Septian Dwi Saputra

NPM : 1321020059

Jurusan : Siyasah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M. H.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**KEWENANGAN PEMERINTAH
DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Septian Dwi Saputra

NPM : 1321020059

Jurusan : Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Perbedaan penetapan awal bulan Kamariah hampir menjadi sebuah fenomena tahunan seperti halnya kebudayaan yang melekat dalam diri bangsa Indonesia. Tercatat beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan Kamariah. Diantaranya pada tahun 1997, 1998, 2007 dan pada tahun 2011. Perbedaan ini menimbulkan dampak psikis masyarakat Indonesia. Masyarakat seperti terombang ambing kebingungan kapan harus memulai Ramadan dan mengakhirinya dengan berlebaran. Dan belum lagi masyarakat harus mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan persiapan sholat Idul Fitri ataupun mengeluarkan zakat fitrah dikarenakan zakat fitrah dianggap sah didalam waktu tertentu saja. Guna menjembatani masalah tersebut, pemerintah mengambil langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai langkah, musyawarah penetapan awal bulan (isbat) telah dilaksanakan oleh Menteri Agama, hanya saja segelintir masyarakat ada yang tidak mematuhi keputusan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah pemerintah memiliki otoritas dalam penetapan awal bulan Kamariah? Dan Bagaimana sebenarnya status penetapan pemerintah tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah memiliki kewenangan menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia dan juga agar mengetahui status hukum menaati Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.

Adapun jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu kajian pustaka atau *library research*, di mana data-data yang didapat merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan karya-karya ilmiah, dengan acuan pada fikih siyasah dengan cara membaca dan menelaah. Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode diskriptif-analitis, artinya dengan mendiskripsikan pemberitaan yang terkait dengan penetapan awal bulan Kamariah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah yang secara khusus diwakilkan Kementerian Agama RI pada dasarnya memiliki kewenangan dalam melakukan isbat dan juga dalam hal penyelesaian perbedaan pendapat penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Kewenangan tersebut didapatkan berdasarkan analisis dalam aspek kewajiban pemimpin dalam hal pertikaian dan analisis ruang lingkup aplikasi ijtihad pemerintah. Kemudian, dalam hal metode penyelesaian sengketa perbedaan pendapat mengenai awal bulan yang dilakukan dengan benar secara bermusyawarah dan keputusan yang mengandung unsur *masalah mursalah*.

Penetapan awal bulan merupakan masalah di bidang *ijtihadiyah*, maka wajar terjadi perbedaan pendapat. Namun ketika permasalahan tersebut telah diadopsi dan ditetapkan oleh pemerintah maka harus tetap mengikuti pemerintah. Karena pemerintah mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Organisasi-organisasi di luar pemerintah hanya sekedar mempunyai hak *ikhbar*, meskipun demikian hendaknya organisasi tersebut tidak boleh mendahului penetapan pemerintah. Kemudian, bagi umat muslim yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad wajib mengikuti kepada pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal
Bulan Kamariah di Indonesia**
Nama : Septian Dwi Saputra
NPM : 1321020059
Jurusan : Siyasa
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Dr. Jayusman, M. Ag.
NIP. 197411062000031002

Ketua Jurusan

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia** disusun oleh **Septian Dwi Saputra**, NPM : **1321020059/SI**, Program Study : Siyasah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Rabu 14 Maret 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua	: Frenki, M. S.i.	(.....)
Sekretaris	: Arif Fikri, S.H.I., M. Ag.	(.....)
Penguji I	: H. Rohmat, S.Ag., M.HI.	(.....)
Penguji II	: Dr. Jayusman, M.Ag.	(.....)

**DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH**


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002

MOTTO

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قُل: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ أَبُو الْقَسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صُومُوا
لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ . (رواه البخاري)

Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu'bah, diceritakan dari Muhammad bin Ziyad ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh. (HR. Bukhori)



P E R S E M B A H A N

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yakni, Ayahanda Sugeng Aryanto dan Ibunda Supriyati yang tiada henti-hentinya dan tak bosan-bosan mendo'akan yang terbaik untuk keberhasilan penulis.
2. Kakak tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Kepada KH. Ahmad Badruzzaman di Ponpes Al-Nizar selaku guru yang tiada hentinya membagikan segenap ilmu kepada saya.



RIWAYAT HIDUP

Septian Dwi Saputra dilahirkan pada tanggal 29 Agustus 1994, di Kelurahan Rawa Laut Kec. Enggal Bandar Lampung, yaitu putra kedua yang dilahirkan oleh seorang ibunda yang bernama Supriyati dan memiliki seorang ayahanda yang bernama Sugeng Aryanto.

Pendidikan penulis bermula di Sekolah Dasar Negeri 1 (SD) Rawa Laut, aktif serta dalam kegiatan Lomba-lomba di bidang MIPA, lalu di tamatkan pada tahun 2006, setelah itu melanjutkan pendidikanya di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. ditamatkan pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012.

Setelah lulus SMA pada tahun 2012, penulis menyadari dengan riwayat pendidikan formal merasa kekurangan pendidikan saya di bidang Agama yang sangat penting untuk urusan akhirat kelak. Dan memutuskan untuk belajar pendidikan Agama di Pondok Pesantren Al-Nizar Kecamatan Bumi Waras Teluk Betung Selatan.

Pada tahun 2013 penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan agama didalam sebuah univesitas Islam. Dan Akhirnya pada tahun 2013 memutuskan beralmamater IAIN Raden Intan Lampung (dulu) sekarang UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah.

KATA PENGANTAR



Assalamualikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, sekaligus selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
4. Dr. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku ketua jurusan Siyasah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Frengki, M.Si., selaku Sekertaris jurusan Siyasah Fakultas Syariah.

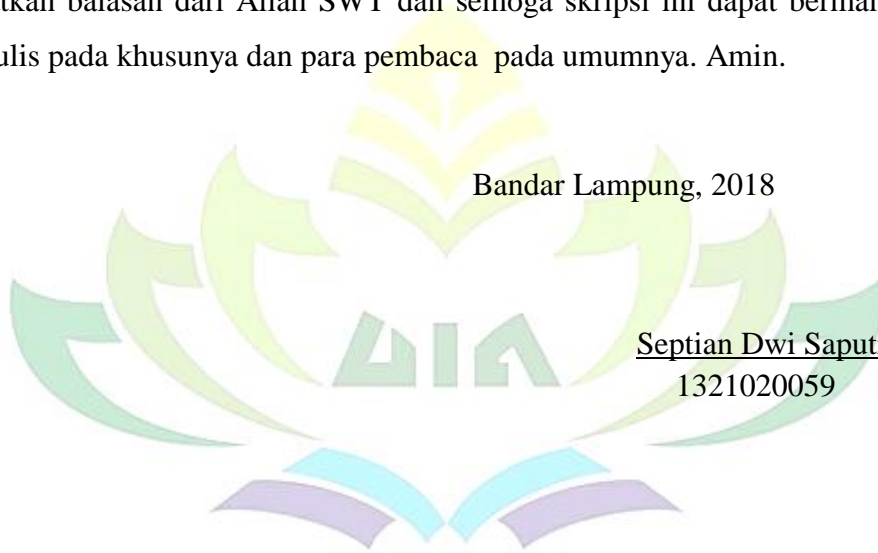
7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan (Hukum Tata Negara) yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 2018

Septian Dwi Saputra
1321020059



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGHANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah	15
B. Landasan Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah	22
C. Macam-macam Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah	26
D. Kewajiban (Tugas) dan Hak Pemimpin Dalam Konsep Fiqh Siyasah.....	39
E. Kewajiban Taat Terhadap Penguasa	46

BAB III PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah Singkat Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	49
B. Dasar Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia	52

C. Metode dan Mekanisme Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah Indonesia	54
--	----

BAB IV ANALISIS

A. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah	59
B. Status Hukum Menaati Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah	62



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH**”, dan untuk menghindari ke salah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

Ada beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. **Kewenangan** menurut Harlod D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society* bahwa wewenang *authority* adalah kekuasaan formal (power formal). Dianggap yang mempunyai wewenang (authority) berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.¹
2. **Pemerintah** dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.² Dan kata “pemerintah” pada judul skripsi ini didefinisikan menjadi Menteri Agama yang notabene berkaitan dengan penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

¹ Miriam Budiardjo, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 64

² M. Iwan Satriawan.dan Siti Khoiriah, “*Ilmu Negara*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), h.13

3. **Penetapan** berarti proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya) : penetapan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan terjadi pada tahun 1928. Sedangkan dalam istilah hukum penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.³
4. **Awal Bulan Kamariah**, yang dimaksud awal bulan Kamariah yaitu suatu kalender yang berkaitan dengan ibadah umat Islam di dalam suatu bulan tertentu. Yaitu ibadah puasa, lebaran, dan haji, secara istilah disebut bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini yaitu, suatu penelitian mengenai kekuasaan formal mengeluarkan perintah yang dipengang oleh alat kelengkapan negara khususnya Menteri Agama dalam hal penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

B. Alasan memilih judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif
 - a. Di dalam kaidah fikih terdapat sebuah kaidah yang berbunyi “*hukm al-hakim ilzamun wa yarfa’u al-khilaf* (keputusan hakim/pemerintah mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat). Namun pada kenyataannya ada ketidakselarasan yang terjadi antara sebagian ormas

³ <http://kbbi.kata.web.id/penetapan/26/5/2017/10:59>

atau masyarakat dengan pemerintah mengenai penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.

- b. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk meninjau kewenangan penetapan awal bulan Kamariah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kacamata fiqh *Siyasah*.

2. Alasan Subyektif

- a. Pokok pembahasan skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasah.
- b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- c. Belum ada yang membahas judul proposal ini di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Kalender berkaitan dengan peradaban manusia, karena berperan penting dalam menentukan waktu berburu, bertani, bermigrasi, peribadatan, dan perayaan-perayaan. Peran penting ini lebih dirasakan oleh umat terdahulu. Walaupun demikian, kalender tidak kurang penting perannannya bagi umat sekarang.⁴

⁴ *Ibid*, h.155

Kita sering mengalami adanya perbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadan serta perbedaan berhari raya Kurban. Perbedaan ini baik dikalangan umat Islam Indonesia maupun antar umat Islam Indonesia dengan umat Islam luar negeri, seperti Malaysia atau Saudi Arabia. Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan keresahan, bahkan lebih dari itu kadang-kadang menimbulkan adanya pertentangan fisik di kalangan umat Islam. Sudah barang tentu perbedaan seperti ini merugikan persatuan dan ukhuwah umat Islam.⁵

Perbedaan pendapat tentang cara penentuan bulan Kamariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sudah timbul sejak lama dalam peradaban Islam. Dalam kaitan ini ada dua pendapat berbeda:

1. Pendapat yang menyatakan bahwa penentuan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah dengan cara rukyat, yaitu melihat bulan secara fisik dengan mata, tidak boleh menentukan awal bulan Kamariah dengan menggunakan hisab astronomi. Pendapat ini merupakan mayoritas sejak dari zaman dari lampau hingga sekarang.
2. Pendapat kedua menyatakan boleh menentukan bulan kamariah, termasuk bulan-bulan ibadah meliputi Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, dengan menggunakan hisab astronomi bahkan penggunaan hisab dipandang lebih utama karena lebih memberikan kepastian dibanding dengan rukyah yang, selain sukar, sering pula tidak akurat. Pendukung pandangan ini

⁵ Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama 2004, "*Selayang Pandang Hisab Rukyat*" Surat Keputusan No.64 Tahun 2003 Dirjen BIPH, h.1

merupakan minoritas kecil di zaman lampau, namun pengikutnya kian bertambah sejalan dengan kian bertambah majunya pengetahuan hisab astronomi. Pada zaman modern, pandangan ini disuarakan oleh ulama-ulama besar seperti Muhammad Rasyid Rida, Mustafa Ahmad az-Zahqa, Ahmad Syakir (ahli hadits pada abad 20), dan Yusuf al-Qaradawi.⁶

Alasan pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa cara syar'i untuk menentukan bulan Kamariah ialah rukyat dan tidak boleh menggunakan hisab adalah beberapa hadis Nabi saw di samping argumen rasional. Hadis-hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hadis-hadis yang memerintahkan memulai dan mengakhiri puasa Ramadan ketika telah melihat hilal antara lain sabda Nabi saw :

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ . (رواه البخاري)

Artinya : *Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka istimasikanlah [HR Bukhari].*⁷

Hadis ini memerintahkan agar memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan rukyah, dan bilamana cuaca berawan sehingga tidak dapat melihat hilal, maka hendaklah dibuat estimasi (perkiraan/perhitungan).

⁶ Syaikh Muhammad Rasyid Rida, et.al., *"Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah"*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 46

⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*(Ttp.: Dar al-Fikr, 1994/1414, II:278-279, hadis no. 1990, "Kitab saum," dari Ibnu Umar), h.234

2. Hadis-hadis yang melarang berpuasa dan beridul fitri sebelum melihat hilal :

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ .
(رواه البخاري)

Artinya: *Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridul fitri sebelum melihat hilal; jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah* [HR al-Bukhari].

Hadis yang melarang memulai dan mengakhiri puasa sebelum melihat hilal. Perintah melakukan estimasi dalam kedua hadis di atas mana kala hilal tidak dapat dirukyat karena langit berawan ditafsirkan dengan menggunakan bilangan bulan sedang berjalan menjadi tiga puluh hari sejalan dengan hadis berikut:

صُومُوا لِرُؤْيَاهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَاهِ ، فَإِنْ غُيِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ .
(رواه البخاري)

Artinya: *Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitriilah karena melihat hilal pula; Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari* [HR al-Bukhari]

3. Hadis tentang keadaan umat yang masih ummi, yaitu yaitu sabda Nabi saw :

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري)

Artinya: *Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian.*

Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari [HR al-Bukhari].⁸

Pemahamannya adalah bahwa hadis ini menjadi illat larangan penggunaan hisab, karena umat tidak mengenal hisab. Penetapan bulan kamariah itu harus berdasarkan sarana yang mudah bagi umat, yaitu rukyat yang tidak memerlukan pengetahuan canggih dan dapat dilakukan semua orang. Ibnu hajar menambahkan bahwa penggunaan rukyat kemudian berlangsung terus sekalipun pada zaman kemudian telah terdapat banyak orang yang menguasai ilmu hisab.

Pada zamannya, Nabi saw dan para sahabat menentukan masuknya bulan baru kamariah, menggunakan rukyah seperti yang tercantum pada hadis.⁹ Praktek dan perintah Nabi saw untuk melakukan rukyah pada masa itu disertai dengan 'illat (kuasa hukum), dapat dipahami keadaan umat pada waktu itu yang masih ummi yaitu keadaan yang belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomis).¹⁰ Seiring perkembangan zaman masyarakat mengenal metode lain seperti metode hisab.¹¹

Di Indonesia, tercatat beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan Kamariah. Diantaranya pada tahun 1997, 1998, 2007 dan pada tahun 2011.¹² Secara psikologi, umat Islam di Indonesia mengalami kebingungan yang tidak

⁸ *Ibid*

⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), 2009, h.77

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Badan Peradilan Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2007, h. 14

¹² Hari Idul Fitri bisa berbeda, Kompas, 26 Agustus 2011. Baca juga di <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/26/2120448/.Hari.Idul.Fitri.Bisa.Berbeda>. Diakses pada 27/5/2017/12:34

sehat, kapan harus mengakhiri atau meneruskan puasanya. Dan belum lagi terkait sholat Idul Fitri ataupun mengeluarkan zakat. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, perbedaan tersebut disinyalir karena terjadi perbedaan pandangan politik. Dengan demikian, masyarakat selalu melihat adanya perbedaan ketimbang persatuan dan kesatuan yang indah.¹³

Dari silang perbedaan pendapat terhadap penetapan awal bulan Kamariah diatas, dapat disimpulkan bahwa persoalan tersebut termasuk dalam kategori *fiqh ijtimai* (ketentuan fikih yang memiliki dimensi sosial), sehingga membutuhkan pengaturan ulil amri untuk kepentingan ketertiban.¹⁴

Maka dari itu, dalam hal penetapan awal bulan, campur tangan *ulil amri* sangatlah menentukan peranan yang sangat signifikan. Di Indonesia peranan ulil amri pada dasarnya sudah teraplikasi melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama dalam hal ini bertindak sebagai representasi pemerintah dalam menetapkan awal bulan. Namun realita di lapangan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Agama) tidak sepenuhnya bulat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat. Padahal dalam kepanitiannya melibatkan seluruh ormas-ormas besar Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lembaga-lembaga ilmiah seperti Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional

¹³ <http://www.detiknews.com/read/2011/08/30/101326/1713447/103/bedasi-kap-politik-beda-hari-aya>. Diakses pada 28/5/2017/22:13

¹⁴ Asrorun Ni'am, "*Idul Fitri Mazhab Negara*", http://www.mui.or.id/index.php?Option=com_content&view=article&id=541: Idul-Fitri-madzhah-negara&catid=35: materi-artikelItemid=56, diakses pada 28/05/2017/23:00

(LAPAN) dan Observatorium Boscha.¹⁵ Padahal didalam al-Qur'an telah dijelaskan sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri kamu, kemudian jika kamu berlainan tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu), dan lebih baik akibatnya.” (QS:al-Nisa’(04):59)

Dengan memperhatikan kandungan hukum dari ayat tersebut. Bahwa pemerintah dalam hal perintahnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan, sebatas perintah tersebut tidak menyuruh kepada kemungkaran. Dan nampaknya ayat tersebut dijustifikasi dengan kaidah fikih yang berbunyi: *“Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat.”*

Dengan demikian, berpijak dari ayat al-Qur'an dan kaidah fikih diatas, masalah-masalah keagamaan yang mempunyai relasi dengan urusan sosial kemasyarakatan, pemerintah berhak ikut campur dan memutuskan. Dan keputusan tersebut pada dasarnya bersifat memaksa (*binding/ilzam*).

Namun persoalannya, sistem pemerintahan di Indonesia bukanlah sistem pemerintahan Islam sebagaimana di praktekkan Nabi pada zaman dahulu. Bagaimana jika pemerintah tersebut mengeluarkan perintah atau kebijakan

¹⁵ Ibid

terkait dengan permasalahan agama? Apakah perintah tersebut harus dipatuhi sebagaimana mestinya?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan fiqh *Siyasah* terhadap kewenangan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia ?
2. Bagaimana status hukum menaati Pemerintah dalam penetapan awal Bulan Kamariah ?

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah pemerintah memiliki kewenangan menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia.
- b. Agar mengetahui status hukum menaati Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoristik, yaitu untuk menguji seberapa jauh kekuatan otoritas kewenangan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

- b. Secara Praktis, yaitu untuk memberikan edukasi terhadap pembaca atau masyarakat dalam mematuhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (Menteri Agama).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, untuk menghasilkan penelitian tersebut dibutuhkan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa data teoritis, penulis menggunakan bahan-bahan *library research* (penelitian pustaka).¹⁶ Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode diskriptif-analitis, artinya dengan mendiskripsikan pemberitaan yang terkait dengan penetapan awal bulan Kamariah.

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M), 2015, h. 21

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Data primer merupakan jenis data yang didapat untuk kepentingan penelitian dan merupakan data utama yang diperoleh peneliti secara langsung, yaitu berdasarkan dari buku Keputusan Menteri Agama RI tentang 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah, buku Ilmu Falak karya Susiknan Azhari serta buku-buku kewenangan pemerintah dalam kajian fiqh *Siyasah*.

b. Data sekunder

Dalam memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penelitian mengidentifikasikan sumber data sekunder yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁷ Diantaranya yaitu jurnal, majalah, atau berbagai literatur lainnya yang berkaitan khusus dengan kewenangan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian yang berkaitan.¹⁸

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 117

¹⁸ *Ibid*, h. 236

Dengan penelitian ini dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data yang tertulis yaitu buku-buku tentang kewenangan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

4. Metode Pengolahan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber dari Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. *Rekontruksi* data yaitu menyusun ulang secara terartur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping kegiatan-kegiatan lain di dalam proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun,

¹⁹ Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Balai Pustaka, Jakarta), 2006, h. 107

mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan penyusun dalam menganalisis data :

- a. Data dari sumber tertulis baik dari primer maupun sekunder yang terkait dengan topic penelitian dikumpulkan sesuai dengan kerangka berfikir atau fokus penelitian diatas. Kemudian dilakukan proses seleksi sehingga di temukan data yang relevan dengan fokus pembahasan atau topic penelitian diatas.
- b. Data yang sudah diseleksi kemudian disusun (*dikonstruk*), ditata sedemikian rupa sesuai dengan atur pikir penyusun sehingga data yang masih terpencar-pencar dan belum terhubungkan satu sama lain menjadi menjadi urut dan terhubung dengan baik.
- c. Data yang sudah terkumpul kemudian ditafsirkan (*interpretasi*) yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian diatas.
- d. Dengan teknik menggunakan *analisis*, penyusun melakukan telaah terhadap kewenangan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Bulan dalam bahasa Arab adalah *al-syahr* juga berarti *al-qamar* yaitu benda yang menjadi satelit bumi. Al-syahr disebut *al qamar* karena sifat nampaknya yang jelas. Menurut Ibnu Sidah Abdul Abbas bulan atau al-syahr adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan bulan (*al-qamar*) karena *al-qamar* itu sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan. Dalam hal ini bulan kamariah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.²⁰

Pembahasan awal bulan Kamariah dalam ilmu falak adalah menghitung waktu terjadinya ijtimak (konjungsi), yakni posisi bulan dan matahari memiliki nilai bujur astronomi yang sama dan menghitung posisi hilal ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.²¹ Satu kali edar lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik atau disebut bulan sinodis.

Penentuan hari dalam awal bulan kamariah adalah saat matahari tenggelam, sedangkan awal sebuah bulan kamariah ditentukan dengan kehadiran bulan baru (hilal) yang dapat dilihat tepat sesaat sebelum matahari tenggelam. Penentuan awal hari tetap dihitung sejak saat matahari tenggelam

²⁰ Ibn Mandzur Jamaluddin al-Anshary, *Lisan al-Arabi*, (Mesir: Darul Ma'arif, tt) Juz XXVI, h. 2351.

²¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka), 2004, h. 3

ini adalah karena detil waktu-waktu prosesi ibadah selanjutnya (jam dan menitnya) murni ditentukan oleh kelakuan gerakan semu matahari mengelilingi bumi, dan terbatas dari posisi bulan itu sendiri.²²

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/ astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.²³

Penentuan awal bulan kamariah sangat penting bagi segenap kaum muslimin, sebab banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan Kamariah. Di antara ibadah-ibadah itu adalah salat dua hari raya, salat gerhana bulan dan matahari, zakat (perhitungan waktunya), puasa Ramadan dengan zakat fitrahnya, haji dan sebagainya. Untuk itu, syara' telah memberikan pedoman dalam menentukan perhitungan waktu.

Paradigma hisab dan rukyat telah ada dalam perjalanan Islam dari sejak zaman nabi Muhammad saw hingga sekarang, dari zaman konsep geosentris hingga zaman heliosentris. Kedua paradigma itu terdapat kesamaan niat umat Islam yaitu menggunakan hilal sebagai penentu awal bulan Islam. Kedua tradisi ini berkeinginan mendapatkan hilal yang presisi dan pasti. Kedua paradigma itu tidak ingin gegabah, hal ini mengandung keseriusan dan

²² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), h. 71.

²³ Miftahul Ulum, "Ijtihad Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Penetapan Awal JHGBulan Kamariah", (journal stainata), 27-9-2017. 22.30

kesungguhan untuk mengetahui kehadiran hilal awal bulan Islam untuk keperluan ibadah.²⁴

Al-Qur'an mengajarkan bahwa hilal dipergunakan untuk menentukan waktu dan ibadah haji. Hadis Nabi mengajarkan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan dengan melihat hilal. Hal di atas menunjukkan bahwa awal mula perhitungan sebuah bulan bergantung pada awal mula munculnya cahaya bulan yang disebut hilal. Pandangan fisik secara aktual terhadap bulan baru lebih diutamakan dalam Islam daripada perhitungan secara teoritis, utamanya dalam menentukan tanggal baru dalam bulan Ramadan dan Syawal.²⁵

Adapun yang dimaksud hilal terdapat banyak pendapat. Menurut T. Djamaluddin hilal adalah bulan sabit pertama yang terlihat di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis dan apabila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bias terlihat cahaya tipis di tepi lingkaran bulan yang mengarah ke matahari. Susiknan Azhari dalam bukunya *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, mendefinisikan hilal adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat setelah ijtimak. Orang Arab berbeda-beda dalam menamakan bulan sesuai dengan umunya. *Pertama*, hilal adalah sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang

²⁴ *Ibid*

²⁵ Hasna Tuddar Putri, "Redefinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi dalam Al-Ahkam, Volume 22, Nomor 1, April 2012, dikutip 30-9-2017, 14:43 h. 106.

terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal. *Kedua, badr* yaitu sebutan untuk bulan purnama dan ketiga *qamar* yaitu sebutan bulan pada setiap keadaan.²⁶

Sementara itu menurut Muhyiddin Khazin, hilal yang dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadi ijtimak sesaat setelah matahari terbenam.²⁷

Bulan adalah benda langit yang tidak mempunyai sinar. Cahayanya yang tampak dari bumi sebenarnya merupakan pantulan dari sinar matahari. Dari hari ke hari bentuk dan ukuran cahaya bulan berubah-ubah sesuai dengan posisi bula terhadap matahari dan bumi. Pada saat bulan persis berada diantara bumi dan matahari yaitu saat ijtimak maka seluruh bagian bulan yang tidak menerima sinar matahari sedang persis menghadap ke bumi. Akibatnya, saat itu bulan tidak tampak dari bumi. Hal demikian disebut bulan mati.

Begitu bulan bergerak, maka ada bagian bulan yang menerima sinar dari matahari terlihat dari bumi. Bagian bulan ini terlihatnya sangat kecil sekali dan berbentuk sabit. Hal demikian disebut hilal awal bulan.

Semakin jauh bulan bergerak meninggalkan titik ijtimak, semakin besar pula cahaya bulan yang tampak dari bumi. Sekitar tujuh hari kemudian setelah bulan mati, bulan akan tampak dari bumi dengan bentuk setengah lingkaran. Itulah yang disebut kwartir I. Kemudian pada pertengahan bulan (sekitar tanggal 15 bulan kamariah), sampailah pada saat bulan pada titik oposisi

²⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cet.III), h. 76-77.

²⁷ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 30.

dengan matahari yaitu saat istiqlal. Pada saat ini, bumi persis sedang berada antara bulan dan matahari. Bagian bulan yang sedang menerima sinar matahari hampir seluruhnya terlihat dari bumi. Akibatnya bulan tampak seperti bulatan penuh. Itulah yang dinamakan dengan bulan purnama (*full moon*).

Setelah itu bulan bergerak terus dan bentuk bulan yang terlihat dari bumi semakin mengecil. Sekitar tujuh hari setelah purnama, bulan akan tampak dari bumi dalam bentuk setengah lingkaran lagi. Itulah yang disebut kwartir II. Akhirnya sampailah pada saat ijtimak kembali menjelang bulan berikutnya di mana bulan sama sekali tidak tampak dari bumi (bulan mati).

Penentuan Tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriyah ada yang berpendapat jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Penetapan ini jika berdasarkan pada hisab, sebab *irtifa' al-hilal* terjadi pada hari Rabu 14 Juli 622 M, saat matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1 Muharram 1 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M. Ini apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi hilal menjelang 1 Muharram 1 Hijriyah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak ada satupun laporan yang menyatakan berhasil rukyat.²⁸

Sistem perhitungan satu bulan kamariah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Dan setelah dilakukan perhitungan secara cermat diketahuilah bahwa dalam 12 bulan atau 1 tahun sama dengan 354 hari 8 jam 48,5 menit yang jika disederhanakan diketahui bahwa dalam satu tahun adalah $354 \frac{11}{30}$ hari.

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam teori, op.cit*, h. 133-136

Masa penanggalan kamariah ini mempunyai siklus 30 tahun.²⁹ Untuk itu, untuk menghindari terjadinya perpecahan tersebut diciptakanlah tahun-tahun panjang dan tahun-tahun pendek yaitu 30 tahun. Dalam 30 tahun tersebut terdapat 11 tahun panjang (tahun kabisat) dan 19 tahun pendek (tahun basitoh). Tahun panjang umurnya 355 hari dan tahun pendek umurnya 354 hari. Tambahan satu hari untuk tahun panjang ini diletakkan pada bulan terakhir yaitu bulan Zulhijah.³⁰

Untuk memahami sekaligus membedakan kedua jenis tahun ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib (khalifah ke 4) merumuskan caranya dalam bait syair:

كف الخليل كفه ديه # عن كل حل حبه فصلان

Syair ini mengisyaratkan tiap huruf yang bertitik sebagai tahun kabisat, dan yang tidak bertitik merupakan tahun basitah.³¹ Tahun-tahun kabisat terdapat pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26 dan 29. Sementara itu, selebihnya adalah tahun-tahun basitah (1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28 dan 30).³²

Nama-nama bulan dimulai dengan bulan: Muharam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah.³³

²⁹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), h. 62

³⁰ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010, h. 108.

³¹ A Kadir, *Cara Mudah menentukan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunnah dan Sains*, (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), h. 32.

³² Slamet Hambali, *op.cit*, h. 62-63

³³ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 109.

Dalam menghisab awal bulan kamariah kegiatannya tiada lain ialah menentukan kedudukan hilal pada saat terbenamnya matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilakukan orang pada saat ijtimak pada bulan-bulan kamariah yang ada hubungannya dengan pelaksanaan-pelaksanaan ibadah.

Penentuan tinggi bulan pada saat matahari terbenam bertujuan agar kedudukan bulan dapat dilokalisir sedemikian rupa, sehingga memudahkan orang yang akan melakukan observasi guna meneliti kebenaran dari ahli hisab.³⁴

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menghisab awal bulan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan terjadinya *ghurub* (terbenamnya) matahari untuk suatu tempat.
2. Menghitung *longitude* matahari dan bulan serta data-data lain dengan koordinat ekliptika.
3. Menghitung terjadinya ijtimak.
4. Kedudukan matahari dan bulan yang ditentukan dengan sistem koordinat ekliptika diproyeksikan ke *equator* dengan koordinat *equator*, sehingga diketahui *mukus* (jarak sudut lintasan matahari dan bulan pada saat terbenamnya matahari).
5. Kedudukan matahari dengan sistem koordinat *equator* itu diproyeksikan lagi ke vertikal, sehingga menjadi koordinat *horizon*. Setelah itu

³⁴ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 147.

ditentukan berapa tingginya bulan (*hilal*) pada saat matahari terbenam dan berapa azimutnya.³⁵

B. Landasan Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah

1. Dasar hukum dari al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah (2) ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ، قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*³⁶

b. Surat al-Taubah (9) ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ

*“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi”.*³⁷

³⁵ Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional: Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas*, (Semarang: LP2M, 2013), h. 64

³⁶ Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Ilmu Falak Praktis*, (Sub Direktorat Pembinaan Syariah Dan Hisab Rukyat, Cet.1, Jakarta 2013), h.98

³⁷ *Ibid*

c. Surat Yunus (10) ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ، مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ

السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.*³⁸

d. Surat al-An'am (6) ayat 97

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، قَدْ فَصَّلْنَا

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”.*³⁹

e. Surat Yasin (36) ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُمْ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

*“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua”.*⁴⁰

³⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleena, 2009), h. 208.

³⁹ *Ibid*, h. 140

⁴⁰ *Ibid*, h. 442.

2. Dasar hukum dari Hadis

a. Hadis Riwayat Bukhori dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قُل: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ أَبُو الْقَسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ . (رواه البخاري)

Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu"bah, diceritakan dari Muhammad bin Ziyad ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh. (HR. Bukhori)⁴¹

b. Hadis riwayat Bukhori dari Ibnu Umar

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ . (رواه البخاري)

Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu"bah diceritakan dari Aswad bin Qais, menceritakan kepada kita Said bin Umar, bahwasannya ia mendengarkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: sungguh Aku adalah umat yang ummi yang tidak bisa menulis dan menghitung, umur bulan itu sekian dan sekian, yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.(HR. Bukhori)⁴²

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja"fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992, Juz I), h. 588

⁴² *Ibid*, h. 589

c. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمِقْصَلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عُلْقَمَةَ) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْذَرُوا اللَّهَ. (رواه مسلم)

Diceritakan kepadaku dari Humaid bin Mas"adah Al Bahili, diceritakan dari Bisyr bin Al Mufaddhal, diceritakan dari Salamah (Ibnu Alqamah) dari Nafi", dari Abdullah bin Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Satu bulan itu 29 hari, bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka takdirkanlah Ia. (HR. Muslim)⁴³

d. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ الزِّيَادِ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَى عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعَدَدَ. (رواه مسلم)

Abdurrahman bin Salam al- Jumahi menceritakan kepada kita, diceritakan dari Robi" (yaitu Ibnu Muslim) dari Muhammad (Ibnu Ziyad) dari Aby Hurairah. Bahwasannya Nabi SAW berkata: Berpuasalah kalian semua karena melihat hilal (Ramadan) dan berbukalah kalian semua karena terlihat hilal (Syawal). Jika hilal tidak tampak atasmu, maka sempurnakanlah bilangan. (HR. Muslim).⁴⁴

⁴³ Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992, Juz 2), h. 760.

⁴⁴ *Ibid*, h. 762

C. Macam-macam Metode Penentuan Awal bulan Kamariah

Metode penentuan awal bulan Kamariah yang berkembang di Indonesia secara garis besarnya terbagi menjadi 2, yaitu rukyat dan hisab. Dibawah ini adalah penjelasan mengenai rukyat dan hisab:

1. Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *al-ra'a* yang artinya melihat,⁴⁵ yaitu observasi atau mengamati benda-benda langit. Rukyat atau lengkapnya rukyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan, setelah matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah sejak masa Rasulullah saw dan permulaan Islam.⁴⁶

Dasar syar'i pelaksanaan rukyat adalah seperti diterangkan antara lain oleh hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah: “berpuasalah kamu sekalian jika melihat dan berbukalah jika melihat hilal, jika keadaan mendung maka sempurnakanlah bilangan Syakban 30 hari”.

Para fuqaha dalam menafsirkan hadis rukyat tersebut berbeda pendapat mengenai kedudukan serta peran hisab dan rukyat dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Cet.I, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.

⁴⁶ Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 133.

⁴⁷ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 36-38

- a. Kelompok pertama ialah mereka yang memberikan kedudukan serta peran utama bagi rukyat dengan mata telanjang dengan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta peran hisab. Yang termasuk kelompok ini adalah fuqoha Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan penganut Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah. Awal Ramadan dan Syawal ditentukan hanya berdasarkan rukyat saja. Rukyat tersebut dapat diterima meskipun bertentangan dengan perhitungan hisab dan bahkan dalam keadaan cuaca mendung. Hisab sama sekali tidak dapat dijadikan pedoman baik bagi orang awam tetapi dapat dijadikan pedoman bagi ahli hisab sendiri.
- b. Kelompok kedua yang memberi kedudukan serta peran utama kepada rukyat sedangkan kedudukan serta peran hisab adalah sebagai pelengkap. Termasuk kelompok ini adalah penganut Imam Ar-Ramli dari kalangan Syafi'iyah.
- c. Kelompok ketiga yang memberi kedudukan serta peran utama kepada hisab sedangkan kedudukan serta peran rukyat sebagai pelengkap. Menurut kelompok ini rukyat dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan hisab. Di samping itu apabila menurut ahli hisab berkesimpulan bahwa hilal mungkin dapat dilihat jika seandainya tidak terhalang mendung atau partikel lainnya, maka hari berikutnya merupakan awal Ramadan atau Syawal.
- d. Kelompok keempat memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab dan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta peran rukyat bagi penentuan awal Ramadan dan Syawal. Kelompok ini sebagian

berpendapat bahwa dasar penentuan awal Ramadan adalah wujudnya hilal. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dasar penentuan kedua bulan tersebut adalah *imakanurukyat*.

Penganut metode rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah di Indonesia terdapat beberapa aliran sebagai berikut:

a. Rukyatul hilal *bi al-fi''li*

Aliran ini dipegang oleh NU sebagai ormas terbesar di Indonesia. Secara substansial, formulasi pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo 1984 yang dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan Rapat Kerja Lajnah Falakiah NU di Pelabuhan Ratu 1992. Kemudian ditegaskan dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-30 di Lirboyo Kediri. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Menurut catatan sejarah, Rasulullah, Khlaufaurrasyidin dan seluruh madzhab empat dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal tidak pernah berdasarkan pada hisab.
- 2) Berdasarkan hadis-hadis hisab rukyat, penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah harus berdasarkan rukyatul hilal atau menyempurnakan 30 hari. Oleh karena itu, penetapan berdasarkan hisab tidak wajib diikuti.

3) Rukyatul hilal hanya diberlakukan dalam satu kawasan wilayahul hukmi (satu negara), sehingga rukyat Internasional tidak dapat diterima.⁴⁸

b. Rukyat Global

Di Indonesia rukyat global dijadikan sebagai penentuan awal bulan kamariah dipegang oleh Hizbut Tahrir.⁴⁹ Bahwa jika hasil rukyat di suatu tempat maka berlaku untuk seluruh dunia.⁵⁰ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang bahwa penentuan awal bulan kamariah tidak dapat didasarkan pada hisab. Menurut HTI rukyatul hilal yang dimaksud bukanlah rukyatul hilal bil ilmi (hisab), akan tetapi rukyatul hilal *bi al-'ain*. Kendatipun rukyat menurut bahasa secara ihtimal (kemungkinan) mengandung arti rukyat *bi al-bashiroh* (melihat dengan hati/ pikiran), namun praktek yang dilaksanakan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa rukyat yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan mata, bukan dengan ilmu hisab.⁵¹

2. Hisab

Hisab berasal dari bahasa arab : *حسب - يحسب - حسابا* - yang berarti hitungan atau bilangan.⁵² Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.

⁴⁸ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia; Sebuah Upaya Penyatuan Madzhab Hisab dan Madzhab Rukya*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), h.140-141.

⁴⁹ Robiatun al-Adawiyah, *Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia*, (Skripsi: Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 54.

⁵⁰ Ahmad Izzudin, *op.cit*, h.86.

⁵¹ Robiatuna al-Adawiyah, *op.cit*, h. 60.

⁵² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 261.

Posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender hijriyah.

Ilmu hisab adalah ilmu yang berkembang terus-menerus dari zaman ke zaman. Secara keseluruhan perkembangan hisab memiliki kecenderungan ke arah semakin tingginya tingkat akurasi atau kecermatan produk perhitungan. Dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, terdapat beragam metode hisab. Para ahli ilmu falak pun mencoba membuat kategorisasi metode-metode hisab tersebut.

Secara garis besar metode hisab awal bulan yang berkembang di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni hisab „*urfi* dan hisab *haqiqi*. Kemudian hisab *haqiqi* terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni hisab *haqiqi taqribi*, hisab *haqiqi tahqiqi* dan hisab *haqiqi* kontemporer.

a. Hisab ‘*urfi*

Hisab ini dinamakan hisab ‘*urfi* karena kegiatan perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran bulan anggaran yang dipedomani pada prinsipnya sebagai berikut.⁵³

1. Ditetapkannya awal pertama tahun hijriyah, baik tanggal, bulan dan tahunnya dan persesuaiannya dengan tanggal masehi, dalam hal ini ditentukan bahwa tanggal 1 Muharram 1 H, bertepatan dengan hari

⁵³ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 95.

Kamis tanggal 15 Juli 622 M atau hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M.

2. Ditetapkan pula bahwa satu tahun itu umurnya 354 11/30 hari, sehingga dengan demikian dalam 30 tahun atau satu daur terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek.
3. Tahun panjang ditetapkan umurnya 355 hari sedangkan tahun pendek ditetapkan 354 hari.
4. Tahun panjang terletak pada deretan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29, sedangkan deretan yang lain sebagai tahun pendek.
5. Bulan-bulan gasal umurnya ditetapkan 30 hari. Sedangkan untuk bulan-bulan genap umurnya 29 hari dengan keterangan untuk tahun panjang bulan yang ke 12 (Zulhijah) ditetapkan 30 hari.⁵⁴

b. *Hisab Haqiqi*

Hisab haqiqi yaitu penentuan awal bulan kamariah dengan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya.⁵⁵ *Hisab haqiqi* terbagi menjadi tiga:

1) *Hisab Haqiqi Taqribi*

Metode ini menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan perhitungan saat terjadi ijtimak bulan dan matahari (konjungsi) serta perhitungan ketinggian (*irtifa'*) hilal pada saat terbenam matahari di akhir bulan yang didasarkan peredaran rata-rata bulan,

⁵⁴ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 37

⁵⁵ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *opcit*, h. 156

bumi dan matahari. Hanya saja, untuk *irtifa'' al-hilal* metode ini belum memasukkan unsur azimuth bulan, kemiringan ufuk, paralaks (*ikhtilaf al-mandhar*) dan lain-lain ke dalam perhitungannya. Metode hisab ini belum dapat menentukan kedudukan bulan.⁵⁶

2) Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Hisab *haqiqi tahqiqi* adalah hisab yang perhitungannya berdasarkan data astronomis yang diolah dengan ilmu ukur segitiga bola dengan koreksi-koreksi gerak bulan maupun matahari yang sangat teliti. Dalam menghitung ketinggian hilal, metode hisab ini memperhatikan posisi observer (lintang tempatnya), deklinasi bulan dan sudut waktu bulan. Bahkan lebih lanjut diperhitungkan pula pengaruh refraksi (pembiasan sinar), paralaks (beda lihat), kerendahan ufuk dan semidiameter atau jari-jari bulan.

Metode hisab ini mampu memberikan informasi tentang waktu terbenamnya matahari setelah terjadinya ijtimak, mengetahui ketinggian hilal ketika matahari terbeanam, nilai azimuth matahari dan bulan untuk suatu tempat observasi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pelaksanaan rukyatul hilal, hisab *haqiqi tahqiqi* ini sangat representatif dijadikan sebagai alat bantu, sebab dengan metode hisab ini para perukyat diajak

⁵⁶ Lajnah Falakiyah, *Pedoman Hisab dan Rukyat Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), h. 6.

untuk memperlihatkan satu daerah titik dimana hilal dimungkinkan akan muncul.⁵⁷

3) Hisab *Haqiqi* Kontemporer

Metode hisab *haqiqi* kontemporer dalam perhitungannya menggunakan penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode hisab *haqiqi tahqiqi*, hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal komputer.⁵⁸

Pada garis dasarnya ada dua sistem yang dipegang para ahli hisab *haqiqi* dalam menentukan awal bulan kamariah, yaitu sistem ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk.⁵⁹

1) Sistem Ijtimak

Aliran ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah itu mulai masuk ketika terjadinya ijtimak (konjungsi). Aliran ijtimak sendiri terbagi menjadi beberapa golongan, diantaranya:

a) Ijtimak *Qabla Ghurub*

Aliran ini mengaitkan saat ijtimak dengan saat terbenam matahari. Kelompok ini membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari maka malam hari

⁵⁷ *Ibid*, h. 51

⁵⁸ Ahmad Izzuddin, *op.cit*, h. 8.

⁵⁹ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 157.

itu sudah dianggap bulan baru (*newmoon*). Namun bila ijtimak terjadi setelah terbenam matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.⁶⁰

b) Ijtimak *Qabla Fajr*

Beberapa ahli hisab mensinyalir adanya pendapat yang menetapkan bahwa permulaan bulan kamariah ditentukan pada saat ijtimak dan terbit fajar. Mereka menetapkan kriteria bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan bila ijtimak terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung. Kelompok ini juga berpendapat bahwa saat ijtimak tidak ada sangkit pautnya dengan terbenam matahari.

c) Ijtimak dan Tengah Malam

Kriteria awal bulan menurut aliran ini adalah bila ijtimak terjadi sebelum tengah malam maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan. Akan tetapi bila ijtimak terjadi sesudah tengah malam maka malam itu masih

⁶⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), h. 107.

termasuk bulan yang sedang berlangsung dan awal bulan (*newmoon*) ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.⁶¹

2) Sistem Posisi Hilal

Kelompok yang berpegang pada posisi hilal menetapkan awal bulan kamariah adalah jika pada saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah bulan baru mulai dihitung.⁶²

Para ahli hisab yang berpegang pada posisi hilal terbagi pada tiga kelompok, yaitu:

a) Kelompok yang berpegang pada ufuk *haqiqi/ true horizon*.

Kelompok ini mengemukakan bahwa awal bulan kamariah ditentukan oleh tinggi *haqiqi* titik pusat bulan yang diukur dari ufuk *haqiqi* (ufuk yang berjarak 90° dari titik zenit/ titik puncak bola langit).

b) Kelompok yang berpegang pada ufuk mar'i/ *visible horizon*.

Kelompok ini menetapkan bahwa awal bulan kamariah mulai dihitung jika pada saat matahari terbenam posisi hilal piringan bulan sudah lebih timur dari posisi piringan matahari. Yang menjadi ukuran arah timur dalam hal ini adalah ufuk mar'i. Jadi artinya menurut kelompok ini, jika pada saat matahari tenggelam tinggi lihat piringan atas hilal sudah berada di atas ufuk mar'i, maka sejak itu bulan baru

⁶¹ *Ibid*, h. 107-108

⁶² Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 157-158.

sudah mulai dihitung. (ufuk mar'i adalah ufuk yang terlihat oleh mata si peninjau. Bedanya ufuk mar'i dengan ufuk *haqiqi* adalah seharga dengan nilai kerendahan ufuk yang diakibatkan oleh ketinggian tempat mata si peninjau).

c) Kelompok yang berpegang pada Imkan rukyat

Awal bulan kamariah menurut kelompok ini dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dapat dirukyat, sehingga diharapkan awal bulan kamariah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Jadi yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.⁶³

Di Indonesia kelompok imkan rukyat diwakili oleh Pemerintah, ormas Persatuan Islam (PERSIS)⁶⁴ dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN).

Pemerintah menggunakan metode imkan rukyat yang merupakan hasil dari pertemuan negara-negara MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura), pada 1992 M. Bahwa dalam putusannya menyatakan penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah sebagai berikut: (a) tinggi bulan

⁶³ Susiknan Azhari, *op.cit*, h. 110.

⁶⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet.III, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 168

minimal 2 derajat, (b) jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, dan (c) umur bulan saat magrib minimal 8 jam.⁶⁵

Thomas Djamaluddin menggunakan imkan al-rukyat sebagai upaya perbaikan terhadap kriteria MABIMS, dengan menganalisa laporan rukyatul hilal Kementerian Agama RI periode 1962-1997. Dari hasil analisisnya dirumuskan kriteria yang disebut kriteria LAPAN, yaitu umur bulan >8 jam setelah ijtima', sudut elongasi bulan-matahari $>5,6$ derajat, beda tinggi >3 derajat untuk beda azimut 6 derajat, tetapi bila beda azimutnya <6 derajat perlu beda tinggi lebih besar lagi, untuk beda azimuth 0 derajat, beda tingginya harus 9 derajat.⁶⁶

Kriteria tersebut disempurnakan menjadi kriteria hisab rukyat dengan kriteria sederhana pada tahun 2011 dengan kriteria jarak sudut bulan dan matahari 6,4 derajat dan beda tinggi bulan-matahari >4 derajat.⁶⁷

Kriteria Imkan rukyat LAPAN 2011 ini digunakan oleh PERSIS dalam menentukan awal bulan kamariah yang sebelumnya menggunakan kriteria imkan rukyat MABIMS sebagai penentu awal bulan.

⁶⁵ Maskufa & Wahyu Widiani, *Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia*. *journal.uinjkt*, dikutip 3/10/2017. 20:46

⁶⁶ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), h. 18.

⁶⁷ *Ibid*, h. 23.

Berikut ini penganut metode hisab sebagai penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

a. Muhammadiyah

Muhammadiyah, sebagaimana dalam keputusan Munas Tarjih XXVI dikemukakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Padang tahun 2003 menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan metode hisab *haqiqi* dengan kriteria wujudul hilal, yaitu kriteria yang didasarkan pada saat terjadinya wujudul hilal di saat terbenamnya matahari.⁶⁸

Dalam menetapkan awal bulan, metode ini memiliki tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), (2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat terbenamnya, piringan atas bulan berada berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Ketiga kriteria di atas semuanya harus terpenuhi sekaligus. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru kamariah belum dimulai.⁶⁹

b. Aboge

Dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, Aboge didasarkan pada perhitungan tahun Jawa lama (*khuruf aboge*) dan rukyatul hilal (observasi dengan mata telanjang saat tenggelamnya matahari).

⁶⁸ Rupi'i Amri, "*Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia: Studi Atas PemikiranThomasDjamaluddin*", diakses 4/10/2017. 23:03

⁶⁹ *Ibid*, h. 10.

Pemikiran Aboge memiliki beberapa prinsip utama yakni: *pertama*, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa, adalah *dina niku tukule enjing lan ditinggal dalu* (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal pada malam harinya). *Kedua*, bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan Aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti perhitungan versi pemerintah.⁷⁰

D. Kewajiban (Tugas) dan Hak Pemimpin Serta Ruang Lingkup Aplikasi Ijtihad Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah

Menurut al-Mawardi tugas seorang pemimpin (pemerintah) secara umum ada sepuluh:

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan kokoh dalam segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah atau ahli syubhat yang merusak ciri agama, seorang imam harus mampu menegakkan hujah dihadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.⁷¹
2. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan diantara dua pihak yang saling bertikai.

⁷⁰ Ahmad Izzuddin, *op.cit*, h. 82 - 83

⁷¹ Imam al_Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, *Op.Cit*, h.33.

3. Melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan-gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT. Tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam.
6. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwai hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimah* (orang non muslim yang hidup dalam Negara Islam dan menerima perlindungan dan keamanan sebagai balasan karena membayar pajak perorangan). Tujuannya adalah agar hak Allah SWT. Dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam diatas agama-agama lain.
7. Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syari'at baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (Kas Negara) tanpa berlebihan ataupun berhemat, juga mengalokasikanya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).

9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan professional dibidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, ditangan mereka, tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
10. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara.⁷²

Kemudian al-Mawardi menyebutkan ada dua hak seorang pemimpin, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apa bila melihat sejarah ternyata ada hak lain bagi pemimpin, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.⁷³

Hak-hak lain seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan negara adalah :

1. Hak mendapat penghasilan (al-Qasimy).

Hak ini terang adanya, sebab imam telah melakukan pekerjaan demi kemaslahatan umum, sehingga tak ada waktu lagi baginya memikirkan kepentingan pribadinya. Hal ini jelas sekali jika dilihat dari ukuran sekarang, meskipun lain halnya dibandingkan masa-masa awal dahulunya,

⁷² Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman *Op,Cit*, h.34.

⁷³ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (Yogyakarta: PT.Arun, Pim dan Yasat, 2000), h.27.

khalifah Abu Bakar atas desakan beberapa sahabat juga mendapatkan penghasilan dari jabatan khalifahnyanya.

2. Hak mengeluarkan peraturan (Haq al-Tasyri')

Seorang pemimpin juga berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat warganya, sepanjang peraturan itu tidak terdapat dalam al-Qur'an dan mengikuti al-Sunnah. Dalam mengeluarkan peraturan-peraturan imam mestilah mengetahui kaedah-kaedah dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Nash. Yang terpenting diantaranya ialah bermusyawarah, yakni dalam mengeluarkan suatu peraturan, ini tidak boleh bertindak sewenang-wenang, ia harus mempertimbangkan fikiran dari para ahli dalam masalah yang bersangkutan. Selain itu peraturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dalam nash Syara' atau dengan ruh-tasyri' dalam al-Quran dan Sunnah.⁷⁴

Pada dasarnya pengaturan hukum Islam mengenai masalah kewenangan penetapan awal bulan belum secara jelas diatur oleh nash secara detail tentang siapa yang berhak berwenang atas penetapan awal bulan. Peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat dan diberlakukan dalam perkara-perkara yang tidak ada nash-nya haruslah mengandung dengan *maslahah al-mursalah* dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada ahli di bidangnya.⁷⁵

⁷⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h.95.

⁷⁵ Yusuf Qhardhawi, "*Al-Siyasat Al-Syari'ah*", diterjemahkan oleh Khatir Suhardi, "*Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*", (Cet: I, Jakarta: Pustaka Kautsar: 1999), h.50

Persoalan perbedaan penetapan awal bulan disinyalir termasuk dalam kategori fiqh ijtimai' (ketentuan fikih yang memiliki dimensi sosial), sehingga membutuhkan pengaturan pemerintah (ulil amri) untuk kepentingan ketertiban.⁷⁶

Di dalam fiqh *siyasah* istilah pemerintah (ulil amri) di bahas dalam sebuah konsep yaitu konsep Imarah. Imarah berarti keamiran yaitu pemerintahan, pengertian ini tidak jauh berbeda dengan imamah. Imarah merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir.⁷⁷ Dalam hal perbedaan penetapan awal bulan ulil amri boleh berpendapat. Menurut Yusuf Qardhawi pendapat seorang ulil amri (pemerintah) dapat diaplikasikan pada tiga ruang lingkup sebagaimana dibawah ini :⁷⁸

1. Hal – hal yang tidak ditetapkan nash.

Artinya, masalah-masalah yang tidak ada dalil syariahnya dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, ataupun yang sudah diatur tetapi tidak secara khusus. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dar'da dari Nabi, beliau bersabda : *“Apa yang di halalkan kitab-Nya, maka ia halal, dan apa yang di haramkan Allah, maka ia haram, dan apa yang di diamkan adalah di maafkan”*.

⁷⁶ Asrorun Ni'am, *“Idul Fitri Mazhab Negara”*, http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=541:idul-fitri-madzhah-negara&catid=35:materi-artikelItemid=56, diakses pada 28/05/2017/23:00

⁷⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*,. Cet. ke-5, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002

⁷⁸ *Ibid*

Qardhawi menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud sesuatu yang tidak ada ketetapan nashnya, bisa jadi sesuatu tersebut tidak ada dalilnya atau ada dalilnya yang bersifat global seperti nash tentang bermusyawarah yang disebutkan dalam firman Allah, “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”⁷⁹ begitu pula firman-Nya “*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*”.⁸⁰

Dari ketentuan ayat diatas, masih bersifat universal dan menyentuh aspek-aspek partikular dalam hal teknisnya, misalnya mengenai siapakah yang harus bermusyawarah, kemudian bagaimana cara pengangkatannya, apa saja yang boleh dimusyawarahkan, bagaimana jika terjadi perbedaan. Hal-hal tersebut belum disebutkan dengan jelas, maka aplikasi dari ayat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada mujtahid, dan merupakan rahmat dari Allah SWT. Dalam kasus seperti inilah pemerintah memiliki sebuah kewenangan untuk melakukan ijtihad, yaitu dalam hal-hal yang belum diatur secara tegas oleh syari’at.

2. Masalah-masalah Yang Memiliki Beberapa Alternatif.

Lingkup kedua yang memberikan tempat bagi pendapat pemimpin untuk diaplikasikan ialah masalah yang mengandung beberapa alternatif. Jika masalah ini terjadi, maka ada tiga pilihannya:

a. Diserahkan Kepada Pilihan Pemimpin.

Syariat menyerahkan kepada pemimpin dalam mengurus dua urusan atau lebih, sehingga dia bisa memilih salah satu diantaranya.

⁷⁹ QS: Al-Imran (3): 159

⁸⁰ QS: Al-Syura (26): 38

Pada dasarnya pemerintah mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dengan rakyatnya mengenai sebuah persoalan. Hakikatnya pemerintah mempunyai pandangan luas dalam meghadapi persoalan dan harus bersikap mengedepankan kemaslahatan dalam mengambil setiap keputusan. Namun yang harus dicatat, bahwa seorang pemerintah tidak boleh menjatuhkan keputusannya yang mengikuti hawa nafsunya dan keinginan hatinya atau menjatuhkan pilihan semaunya sendiri tanpa dilandasi alasan.

b. Terdapat Beberapa Macam Pendapat dan Ijtihad

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk berijtihad salah satunya dalam persoalan yang memiliki beberapa alternatif. Diantaranya ada mempunyai beberapa ijtihad atau pendapat, yang mana pendapat tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, sementara tidak ada nash kongkrit yang bisa menuntaskan perbedaan dan menyelesaikan perselisihan.

Jika dilihat, hukum-hukum fiqh Islam termasuk dalam kategori diatas, karena banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan dikalangan fuqoha, dan sangat sedikit nash *qath'i* yang membahas suatu hukum. Maka kewajiban seorang ulil amri adalah melakukan ijtihad untuk memilih alternatif dan men-*tarjih* dari beberapa pendapat yang sudah ada. Yang dianggap mempunyai dalil yang kuat dan diyakini sebagai alternatif pemecahan yang paling dekat dengan pengejawantahan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan.

c. Kemaslahatan Terikat (*Maslahah al-Mursalah*)

Salah satu lingkup dari ijtihad *ulil amri* dalam politik *syar'iyah* adalah *maslahah al-mursalah*. *Maslahah al-Mursalah* adalah termasuk dalam kategori masalah-masalah yang belum ada dalil nash-nya. Namun *maslahah al-mursalah* mempunyai batasan tersendiri, makna kemaslahatan adalah segala sesuatu yang di dalamnya terkandung kebaikan dan manfaat bagi manusia dalam urusan dunia maupun akhiratnya.⁸¹

Penggunaan maslahat ini didasarkan pada banyaknya dalil-dalil umum menjelaskan bahwa syariat sangat memperhatikan terhadap kemaslahatan manusia dan memang menjadi tujuan syariat. Imam yang paling banyak menggunakan "*maslahah al-mursalah*" adalah imam Malik dan para pengikutnya. Imam yang paling jarang menggunakan *maslahah al-mursalah* adalah imam Syafi'i.

E. Kewajiban Taat Kepada Penguasa dalam Hukum Islam

Dalam hal berselisih penetapan dengan pemerintah, ketika seseorang telah meyakini kebenaran awal bulan tersebut, para ulama terdahulu berselisih pendapat sebagai berikut : pertama, seseorang tersebut boleh berpuasa bila melihat hilal bulan Ramadan dan berbuka apabila melihat hilal bulan Syawal dan melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak kelihatan menyelesaikan kaum muslimin yang lain. Maksud dari perintah untuk berbuka secara sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan perpecahan diantara umat

⁸¹ Yusuf Qhardhawi, *op.cit*, h. 71-80

Islam. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, mereka berdasarkan pada hadis yang secara mutlak memerintahkan untuk berpuasa dan berbuka dengan melihat hilal (*sumu li al-rukyatihi wa al-afthiru li al-rukyatihi*). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab.⁸²

Kedua, seseorang tersebut berpuasa jika melihat hilal Ramadan, namun untuk berbuka dan berhari raya maka dia mengikuti bersama umat Islam lainnya. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Malik dan yang Mashur dari mazhab Imam Ahmad.⁸³

Ketiga, seseorang tersebut tidak boleh mengikuti rukyahnya, yang wajib baginya untuk berpuasa dan berbuka mengikuti kaum muslimin lainnya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.⁸⁴

Kemudian penjelasan mengenai taat kepada pemimpin (ulil amri) telah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri kamu, kemudian jika kamu berlainan tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika

⁸² Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz II, h.280

⁸³ Malik bin Anas bin Malik bin Amir, *Al-Mudawanah*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah), h. 226-227

⁸⁴ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Bid'akah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya*, (Gresik : Pustaka Fuqon, 2011), h.162

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu), dan lebih baik akibatnya.”(QS:al-Nisa’(04):59)

Dengan memperhatikan kandungan hukum dari ayat tersebut. Bahwa pemerintah dalam hal perintahnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan, sebatas perintah tersebut tidak menyuruh kepada kemungkaran.

Dengan demikian, berpijak dari ayat al-Qur’an dan kaidah fikih diatas, masalah-masalah keagamaan yang mempunyai relasi dengan urusan sosial kemasyarakatan, pemerintah berhak ikut campur dan memutuskan. Dan keputusan tersebut pada dasarnya bersifat memaksa (*binding/ilzam*).



BAB III

PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah Singkat Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Selama pertengahan pertama abad ke dua puluh, peringkat kajian hisab rukyat hanya dapat dicapai di Mekkah, yang kemudian diganti Kairo. Karena di sana Islam berkembang dan banyaknya para alim ulama dan ilmuwan. Banyak orang yang ingin mengkaji Islam lebih dalam berbondong-bondong datang ke sana, tidak kecuali para alim ulama atau ilmuwan Indonesia. Pantaslah kiranya pemikiran hisab rukyat di Jazirah Arab sangat berpengaruh dalam pemikiran hisab rukyat di Indonesia. Seperti Muhammad Mansyur al-Batawi yang mengarang kitab *Sullamun Nayyirain*, ternyata secara historis merupakan hasil dari *rihlah ilmiyyah* yang beliau lakukan selama di Jazirah Arab. Sumber jadwal yang dipakai berasal dari Ulugh Beik, begitu pula beberapa kitab hisab rukyat yang berkembang di Indonesia. Dan banyak kitab Indonesia merupakan hasil cangkakan kitab karya Ulama Mesir yakni *Al-Mathla'ul Said fi Hisaabil Kawakib ala Rasdi Jadid*.⁸⁵

Sebelum kedatangan agama Islam, di Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Saka yang dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M. Namun sejak tahun 1043 H/1633 M yang ketepatan 1555 tahun Saka, tahun Saka diasimilasikan dengan Hijriyah, kalau mulanya tahun Saka berdasarkan peredaran matahari, oleh Sultan Agung

⁸⁵Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.47

diubah menjadi tahun Hijriyah, yakni berdasarkan peredaran bulan, sedangkan tahunnya tetap meneruskan tahun saka tersebut.⁸⁶

Sehingga jelas bahwa sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyat, hal ini ditandai dengan adanya penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender resmi.

Penanggalan Hijriyah atau penanggalan Islam digunakan di Indonesia sebagai penanggalan resmi semenjak berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam. Hal ini menunjukkan berkembangnya hisab dan rukyah sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Dengan datangnya penjajahan Belanda penanggalan Masehi mulai diterapkan dalam kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan dijadikan sebagai penanggalan resmi. Namun umat Islam tetap mempergunakan penanggalan Hijriyah terutama di daerah-daerah kerajaan Islam.⁸⁷ Belanda membiarkan pemakaian dan penanggalan. Adapun pengaturannya diserahkan kepada para penguasa kerajaan-kerajaan Islam dalam mengatur hari-hari yang berhubungan dengan peribadatan, seperti tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah.

Sejak abad pertengahan yang didasarkan pada sistem serta tabel matahari dan bulan yang disusun oleh astronom Sultan Ulugh Beik As-Samarkand. Ilmu Hisab ini berkembang dan tumbuh subur terutama di pondok-pondok pesantren di Jawa dan Sumatera. Kitab-kitab ilmu hisab yang dikembangkan para ahli hisab di Indonesia biasanya mabda' (epoch) dan

⁸⁶ Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta: Siaran, 1957), h. 12

⁸⁷ Departemen Agama, *Almanak Hisab dan Rukyat*, h. 22.

markaznya disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya. Seperti Nawawi Muhammad Yunus al-Kadiri dengan karya Risalatul Qamarain dengan markaz Kediri. Walaupun ada juga yang tetap berpegang pada kitab asal (kitab induk) seperti al-Mathla'ul Said fi Hisaabil Kawakib ala Rasydil Jadid karya Syekh Hussain Zaid al-Misra dengan markaz Mesir. Dan sampai sekarang khazanah (kitab-kitab) hisab di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak apalagi banyak pakar hisab sekarang yang menerbitkan kitab falak dengan cara menanamkan kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat disamping adanya kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh para pakar astronomi dalam mengolah data-data kontemporer berkaitan dengan hisab rukyat.⁸⁸

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kementerian Agama yang dulunya bernama Departemen Agama Republik Indonesia didirikan tanggal 3 Januari 1946. Setelah berdirinya Depag, persoalan yang terkait dengan libur Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah diserahkan dan menjadi kewenangannya. Ini berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/ Um, 7/Um, 9/Um jo Keputusan Presiden No. 251 tahun 1967, No. 148 tahun 1968 dan No.10 tahun 1971.⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Izzudin, *op.cit*, h. 49.

⁸⁹ Jayusman, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusikamila Press Fak.Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung), Cet. Ke-2), h.40

B. Dasar Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Otoritas/peraturan yang menjadi dasar kewenangan Menteri Agama dalam penetapan awal bulan Kamariah yang pertama, yaitu dalam Penetapan Pemerintah No.2/Um Tahun 1946. Pada tahun 1946 Presiden Republik Indonesia Soekarno dalam Berita RI 1946 menetapkan aturan tentang Hari Raya. Dengan menimbang bahwa perlu diadakannya aturan tentang hari raya setelah mendengar Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan menetapkan aturan tentang Hari Raya. Di dalam aturan umum PP ini dijelaskan terdapat banyak hari raya seperti hari raya umum (tahun baru, 1 Januari), hari raya Islam, hari raya Kristen, hari raya Tion Hwa. Dan yang lebih penting dijelaskan bahwa untuk tahun seterusnya hari raya diatas tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi jelas dalam PP ini Menteri Agama telah diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk menetapkan hari raya khususnya hari raya Islam (Kalender bulan Kamariah).⁹⁰

Selanjutnya dalam PP No.7 Tahun 1946, di dalam PP ini terbentuk Hari Libur Nasional yang baru yaitu pada tanggal 5 Oktober menjadi hari raya Angkatan Perang. Dalam artian di dalam pasal 1 PP No.2/Um Tahun 1946 aturan tentang hari raya ditambahkan menjadi tiga yaitu dengan memasukkan Hari Peringatan Angkatan Perang 5 Oktober dan Penetapan ini mulai berlaku

⁹⁰ Lihat pasal 7 PP No.2/Um Tahun 1946 tentang Aturan Hari Raya

pada tanggal 4 Oktober 1946 yang ditandatangani Presiden Soekarno dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifoedin.⁹¹

Selanjutnya pada PP No.9/Um Tahun 1946, Presiden Soekarno lewat PP ini menimbang bahwa pada tanggal 10 November 1945 adalah hari yang mengandung peristiwa yang penting dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia dan menimbang pula bahwa hari tersebut patut diperingati hari raya umum negara Republik Indonesia. Dan mengingat bahwa dalam pasal 1 PP No.2/Um Tahun 1946 tentang aturan hari raya perlu ditambah menjadi 4 yaitu Hari Pahlawan pada tanggal 10 November.⁹²

Lalu pada tahun 1967 telah terbit Keputusan Presiden No.251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur. Di dalam Keputusan Presiden ini pejabat Presiden RI telah menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera Khususnya yang merupakan pra kondisi untuk melaksanakan Pembangunan Nasional di segala bidang dan untuk memperbanyak/mempertinggi prestasi kerja maka dianggap perlu mengurangi jumlah hari-hari libur dan perlu meninjau kembali peraturan yang berlaku mengenai hari-hari libur. Dalam pasal 3 Keputusan Presiden tersebut telah disebutkan bahwa penetapan tanggal hari-hari libur (yang terdapat dalam pasal 1) pada tiap tiap tahun dilakukan oleh menteri yang disertai urusan agama.⁹³

⁹¹ Lihat pasal 1 PP No.2/Um Tahun 1946 tentang Aturan Hari Raya, didalam Aturan Umum pasal 1 dijelaskan bahwa Hari Raya Umum ialah 1. Tahun Baru, 1 January 2. Hari Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus dan Hari Angkatan Perang

⁹² Lihat pasal 1 PP No. 9/Um

⁹³ Hari-hari raya tersebut dibawah ini ditetapkan sebagai hari libur : 1. 1 Januari 2. Idul Fitri (dua hari) 3. Idul Adha 4. Maulid Nabi Muhammad SAW 5. Natal (hari pertama) 6. 1 Muharram 7. Proklamasi Kemerdekaan 8. 1 Mei 9. Mi'raj Nabi Muhammad SAW 10. Kenaikan Isa al-Masih 11. Santa Maria

Berikutnya yaitu Keputusan Presiden Tahun 1968 tentang Perubahan Keppres No.251 Tahun 1967 tentang hari-hari libur. Setelah beberapa PP dan Keppres yang memuat penambahan hari libur Nasional pada Keppres ini justru hari libur Nasional dikurangkan yaitu pada hari mengenai 1 Mei sebagai hari libur bagi kaum buruh dihapuskan dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.⁹⁴

Dan yang terakhir dalam Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1971 tentang Hari wafat Isa al-Masih dinyatakan sebagai Hari Raya/Hari Libur. Penambahan hari libur pada tahun 1971 pun ditambahkan dengan menimbang bahwa untuk meningkatkan kemanfaatan peribadatan bagi masyarakat Protestan dan Khatolik, dipandang perlu untuk mengubah Hari Raya/Hari Libur Santa Maria menjadi Hari Raya/Hari Libur Wafatnya Isa al-Masih. Menimbang pula bahwa berhubung dengan itu perlu untuk meninjau kembali Keputusan Presiden No.251 Tahun 1967 jo Keputusan Presiden No.148 Tahun 1968. Selanjutnya mengingat pasal 4 ayat 1 dan pasal 29 UUD 1945, Keppres No. 251 Tahun 1967, dan Keppres No.148 Tahun 1968.⁹⁵

C. Metode dan Mekanisme Penetapan Awal Bulan Kamariah Oleh Pemerintah Indonesia

Dalam rangka memberikan jalan tengah (*problem solving*) dalam permasalahan awal bulan Kamariyah di Indonesia, yang sampai sekarang ini masih terjadi perdebatan antar ormas Islam yang belum diketahui kapan

⁹⁴ Lihat pasal 1 Keputusan presiden No.148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur

⁹⁵ Lihat Pasal 2 Keppres No.10 Tahun 1971, Hari Wafat Isa al-Masih (9 April), dinjatakan sebagai Hari Raya/Hari Libur

berakhirnya, pemerintah memberikan sebuah tawaran metode penetapan awal bulan yang disebut dengan *imkânurukyah*. Secara harfiah, *imkânurukyah* berarti kemungkinan hilâl terlihat. Sedangkan dalam bahasa Inggris biasanya diistilahkan dengan *visibilitas hilal*.

Selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, pelaku hisab juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. Faktor yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya keberadaanya di atas ufuk, melainkan ketinggian dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. Kriteria itu didasarkan pada hasil rukyat jangka panjang yang dihitung secara hisab, sehingga dua pendapat hisab dan rukyat dapat terakomodasi. Kriteria itu digunakan untuk menghindari rukyat yang meragukan dan digunakan untuk penentuan awal bulan berdasarkan hisab. Dengan demikian diharapkan hasil hisab dan rukyat akan selalu seragam.⁹⁶

Kriteria *imkânurukyah*, merupakan kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah, yang posisinya menjembatani antara kriteria *rukyatul hilal* dan kriteria *wujudul hilal*. Kriteria ini banyak dipergunakan oleh pemerintah-pemerintah di ASEAN dalam menentukan awal bulan Kamariah. Kemudian muncul dalam penanggalan hijriyah standard empat negara ASEAN, kriteria ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Menurut musyawarah tersebut, Awal bulan terjadi jika: Pertama, Pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) hilal di atas cakrawala minimum

⁹⁶ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional: 2001), h.11

2°, dan sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan Matahari minimum 3°. Ketinggian 2° ini merupakan Kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman rukyatul hilal di Indonesia selama puluhan tahun, walau pun secara internasional sangat diragukan posisi 2° hilal bisa dilihat karena masih terlalu rendah. *Kedua*, Pada saat matahari terbenam, usia hilal lebih 8 jam dihitung sejak ijtima, sehingga cahaya hilal telah mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.⁹⁷

Sebelum diadakannya sidang isbat awal bulan Kamariah, terlebih dahulu pemerintah melakukan kegiatan *rukyaatul hilal* (pengamatan bulan). Adapun secara teknis, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan *rukyaatul hilal*. Secara garis besar, di antara beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian menginstruksikan kepada Kementerian Agama kabupaten (untuk daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan rukyat) untuk berkoordinasi badan Hisab Dan Rukyat dan Pengadilan Agama setempat tentang persiapan kegiatan rukyat awal bulan hijriyah. (Biasanya untuk awal bulan Ramadan, Syawal dan Julhijah); (2) Kepala Kantor Kementrian Agama daerah setempat selaku koordinator acara kegiatan rukyat berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Agama setempat agar menunjuk seorang Hakim dan Panitera sidang untuk melakukan sidang isbat kesaksian rukyat bila hilal berhasil dirukyat oleh orang perukyat. (3) Setelah itu, Kepala Kantor Kementerian Agama daerah tersebut mengirimkan surat kepada beberapa

⁹⁷ Thomas, *op.cit*, h.18

ormas Islam dan para perukyat agar hadir pada acara rukyat yang telah ditetapkan. (4) Pada hari pelaksanaan rukyat, dilaksanakan pada jam yang telah disepakati. Bila hilal berhasil dirukyat oleh perukyat, perukyat melapor kepada Koordinator/Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Kemudian, Kementerian Agama memohon kepada Hakim Pengadilan Agama agar segera diadakan persidangan untuk memeriksa dan menetapkan kesaksian hilal. (5) Hasil rukyat, baik *hilal* yang berhasil dilihat, maupun tidak, dilaporkan kepada Kementerian Agama RI/BHR Pusat sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama RI dalam menetapkan awal Bulan yang bersangkutan.⁹⁸

Setelah hasil dilaporkan kepada Kementerian Agama RI (pusat) dari beberapa lokasi-lokasi pelaksanaan rukyat di seluruh Indonesia. Maka setelah itu, Kementerian Agama mengadakan sidang isbat. Hadir dalam sidang tersebut beberapa perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Begitu juga melibatkan dari tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) di antaranya, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

Rapat sidang penetapan awal bulan diawali dengan pemaparan tentang prakiraan cuaca dan hal ihwal tentang hilal dari tim ahli seperti dari BMKG, LAPAN dan Observatorium Bosscha ITB. Kemudian disambung presentasi hasil observasi hilal. Setelah mendengar presentasi hasil observasi hilal,

⁹⁸ Ahmad Sanusi, *Tata Laksana Kegiatan Rukyat Hilal Awal Bulan Hijriyah Di Pob Palabuhanratu*, <http://www.pa-cibadak.go.id/artikel/baca/17>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2017, 22.47

Kementerian Agama mempersilahkan kepada para peserta untuk memberi masukan dan penjelasan mengenai hasil pengamatan hilal. Setelah dianggap cukup, ketua majelis sidang memberikan kesimpulan, setelah mengolah beberapa pertimbangan dan masukan mengenai hasil rapat kemudian membacakan kembali hasil rapat kepada para peserta.

Setelah itu menawarkan hasil tersebut untuk dimintakan kesepakatan kepada peserta sidang. Hasil suara mayoritas dari peserta sidang kemudian diambil sebagai pertimbangan. Ketua Majelis selanjutnya menetapkan dengan pertimbangan suara mayoritas tersebut. Sehingga menjadi sebuah ketetapan hasil dari sidang istbat pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.⁹⁹



⁹⁹ Sidang Isbat penetapan 1 syawal pada 29 Agustus 2011, (<http://humassambas.com/info-humas/sidang-itsbat-penetapan-1-syawal-1432-pada-29-agustus-2011/>), diakses 9/10/2017, 22.53

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Penetapan Awal Bulan Kamariah oleh Pemerintah Indonesia

Agar mendapat hasil yang jelas mengenai kewenangan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah maka analisis akan dimulai dengan menilik kewajiban pemimpin dalam Fiqh Siyasah.

Merujuk landasan teori kewajiban (tugas) pemimpin yang dikemukakan oleh imam al-Mawardi, maka teori yang digunakan dalam tugas pemimpin salah satunya yaitu pemimpin (pemerintah) harus memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling bertikai (berbeda pendapat).

Dalam permasalahan perbedaan penetapan awal bulan, melalui teori kewajiban (tugas) pemimpin yang bahwasanya pemimpin (pemerintah) harus memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling bertikai, maka secara otomatis pemerintah mendapatkan sebuah kewenangan untuk meleraikan pertikaian-pertikaian tersebut baik dalam hal penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia.

Langkah selanjutnya dari analisis ini yaitu mengkaji ruang lingkup pendapat (ijtihad) pemerintah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan mengenai batas aplikasi pendapat pemerintah. Di antaranya ada tiga yaitu: pertama, hal-hal yang tidak ditetapkan oleh nash al-Qur'an. Kedua, masalah-

masalah yang memiliki beberapa alternatif. Dan yang ketiga, dalam kategori masalah mursalah.¹⁰⁰

Dalam penetapan awal bulan Kamariah, jika merujuk pada tiga kategori diatas, nampaknya persoalan perbedaan penetapan awal bulan diatas merujuk pada masalah-masalah yang mempunyai beberapa alternatif. Artinya, dalam penetapan awal bulan Kamariah memiliki lebih dari satu metode yaitu hisab dan rukyat. Maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif hukum.

Kesimpulan analisis pendapat (ijtihad) pemerintah, yaitu bahwa keikutsertaan pemerintah dalam hal penetapan awal bulan Kamariah sudah termasuk dalam ruang lingkup ijtihad pemerintah. Dan tidak dianggap keliru jika pemerintah menetapkan awal bulan karena termasuk dalam ruang lingkup ijtihad pendapatnya.

Kemudian analisis ini mengacu pada mekanisme penetapan awal bulan Kamariah oleh pemerintah Indonesia. Setelah mengamati pemerintah dalam hal mekanisme penetapan awal bulan di dalam bab sebelumnya, bahwa metode pengambilan keputusan dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan semua pihak mempunyai kapasitas dan kapabilitas terhadap masalah penetapan awal bulan adalah merupakan cara yang demokratis.

Di dalam Islam mengajarkan seorang muslim untuk selalu menyelesaikan sebuah persoalan dengan jalan bermusyawarah, sebagaimana di uraikan dalam al-Qur'an dan al-sunnah begitu juga dipraktekkan oleh

¹⁰⁰ Yusuf Qhardhawi, *Al-Siyasat, op.cit*, h.71-80

Rasulullah saw. Maka dari itu, pilihan Kementerian Agama untuk menyelesaikan persoalan penetapan awal bulan Kamariah dengan musyawarah merupakan kebijakan yang baik.

Selanjutnya dalam konteks putusan pemerintah itu sendiri. Menurut penulis putusan pemerintah dalam hal penetapan awal bulan telah mengandung unsur kemaslahatan yaitu berupa persatuan dan kesatuan umat. Ketika pada awalnya masyarakat merasa kebingungan atau ketidakpastian kapan mereka harus mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan. Dengan adanya keputusan pemerintah membuat permasalahan tersebut menjadi jelas dan terang. Dan seharusnya kaidah fiqh yang berbunyi “*hukm al-hakim ilzamun wa yarfa’u al-khilaf* (keputusan hakim/pemerintah mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat) telah terlaksanakan dengan baik di Indonesia tercinta ini.¹⁰¹

Kesimpulan dari analisis diatas adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai kewenangan dalam hal penetapan awal bulan Kamariah. Artinya, pemerintah berwenang menetapkan (isbat) awal bulan Kamariah. Sedang orang, instansi atau ormas Islam diluar pemerintah pada hakikatnya tidak ada kata isbat bagi awal bulan Kamariah. Namun hanya sebatas *ikhbar* (mengumumkan) kepada anggota masing-masing. Karena kewenangan sepenuhnya dalam penetapan awal bulan hanya pada pemerintah.

¹⁰¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Ruykat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.150-151

B. Bagaimana Status Hukum Menaati Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Setelah menganalisis tentang kewenangan penetapan awal bulan Kamariah yang hasilnya adalah pemerintah memang mempunyai kewenangan dalam hal penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia, selanjutnya skripsi ini akan menganalisis tentang bagaimana status hukum dari kewenangan pemerintah tersebut dalam aplikasi masyarakat menaati hasil dari kewenangan tersebut.

Masalah penetapan awal bulan Kamariah diidentifikasi karena adanya perbedaan metode (cara) ataupun perbedaan ijtihad dalil yang berbeda dari para fuqoha dari jaman dahulu hingga sekarang. Permasalahan penetapan awal bulan termasuk masalah *fiqh* atau *ijtihadi* karena konteks nya yang dibidang ibadah (amaliyah), sehingga banyak terjadi perbedaan. Dan identifikasi lanjutan masalah penetapan awal bulan Kamariah ini ditemukan bahwa bukan termasuk dalam golongan *ushul* melainkan produk dari masalah *furu'* sehingga permasalahan tersebut menerima ijtihad baru ataupun *tajdid* dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk berijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Namun, jika kita merujuk pada al-Qur'an surah an-Nisa ayat 59 yang intinya bahwa selain taat kepada Allah dan Rasul kita umat manusia diperintahkan pula untuk taat kepada *ulil amri* (pemerintah). Menurut Yusuf Qardhawi, ketika sebuah permasalahan telah diadopsi oleh pemerintah maka rakyat harus mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh *ulil amri*

(pemerintah). Karena wajib hukum nya untuk mengikut pada *ulil amri*. Dan selama kebijakan atau perintah dari pemerintah masih sejalan dengan syari'at dan tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak mematuhi perintah tersebut.¹⁰²

Dalam hal berselisih penetapan dengan pemerintah, ketika seseorang telah meyakini kebenaran awal bulan tersebut, para ulama terdahulu berselisih pendapat sebagai berikut : pertama, seseorang tersebut boleh berpuasa bila melihat hilal bulan Ramadan dan berbuka apabila melihat hilal bulan Syawal dan melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak kelihatan menyelesaikan kaum muslimin yang lain. Maksud dari perintah untuk berbuka secara sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan perpecahan diantara umat Islam. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, mereka berdasarkan pada hadis yang secara mutlak memerintahkan untuk berpuasa dan berbuka dengan melihat hilal (*sumu li al-rukyatihi wa al-afthiru li al-rukyatihi*). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab.¹⁰³

Kedua, seseorang tersebut berpuasa jika melihat hilal Ramadan, namun untuk berbuka dan berhari raya maka dia mengikuti bersama umat Islam lainnya. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Malik dan yang Mashur dari mazhab Imam Ahmad.¹⁰⁴

¹⁰² Qhardhawi, *Al-Siyasat*, *op.cit*, h.50

¹⁰³ Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz II, h.280

¹⁰⁴ Malik bin Anas bin Malik bin Amir, *Al-Mudawanah*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah), h. 226-227

Ketiga, seseorang tersebut tidak boleh mengikuti rukyahnya, yang wajib baginya untuk berpuasa dan berbuka mengikuti kaum muslimin lainnya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.¹⁰⁵

Berpijak dari ketiga pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa tujuan dari ketiga pendapat tersebut salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan yakni terciptanya persatuan dan kesatuan internal umat Islam. Dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i yang memperbolehkan untuk berpuasa dan berbuka menyelisihi khalayak ramai atau masyarakat. Akan tetapi harus secara sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat menyelisihi umat Islam yang lain. Abu Hanifah dan Imam Malik, memperbolehi untuk berpuasa terlebih dahulu, akan tetapi ketika berbuka atau lebaran ia harus mengikuti umat Islam lainnya. Begitu juga Ibnu Taimiyah yang mewajibkan untuk mengikuti umat Muslim lainnya dan tidak memperbolehkan untuk berbuka ataupun berpuasa sendirian. Ini tidak lain hanya untuk menjaga kebersamaan, kesatuan dan persatuan umat Islam. Sehingga penulis berkesimpulan tujuan dari ketiga *qaul* tersebut adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan umat, dan menghindari perpecahan dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Melihat realita di negara Indonesia, bahwa terkadang ormas-ormas Islam pernah berselisih (berbeda pendapat) dengan pemerintah ataupun sesama ormas Islam yang lain dalam menentukan awal bulan Kamariah. Sesungguhnya, ketika melihat substansi dan tujuan dari *qaul* diatas, pada zaman dahulu ormas-ormas (mazhab-mazhab) Islam nampak tidak

¹⁰⁵ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Bid'akah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya*, (Gresik : Pustaka Fuqon, 2011), h.162

menonjolkan keegoisannya dalam persoalan penetapan awal bulan Kamariah, mereka lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan umat. Mengacu kepada realita di Indonesia, ketika ada ormas Islam yang berbeda penetapan awal bulan dengan pemerintah, menurut mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Namun dengan catatan, ketika berpuasa dan berbuka harus secara sembunyi-sembunyi demi menjaga persatuan umat.

Namun pada zaman modern ini, dengan perkembangan teknologi yang canggih. Dapat dipastikan kabar tentang perbedaan awal bulan Kamariah dapat tersebar dengan cepat. Maka hal yang sesungguhnya harus dirahasiakan dapat tersebar dengan cepat. Maka hal yang sesungguhnya harus dirahasiakan dapat tersebar dengan cepat. Untuk menghindari hal demikian, hendaknya setiap ormas Islam tidak mendahului penetapan pemerintah dalam menetapkan awal bulan Kamariah.

Melihat pembahasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa tetap saja pemerintah mempunyai kekuatan dan otoritas dalam penetapan (*itsbat*) awal bulan. Adapun ormas Islam, organisasi ataupun perorangan hanya sekedar *ikhbar* tentang awal bulan Kamariah. Keputusan pemerintah tersebut, mengikat kepada mereka (masyarakat awam) yang tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menentukan awal bulan Kamariah. Maka mereka wajib untuk mengikuti pendapat pemerintah (Kementerian Agama). Disatu sisi, ada hak *ikhbar* bagi organisasi ataupun ormas-ormas Islam yang mempunyai kemampuan ijtihad dan seperangkatnya untuk melakukan observasi atau pengamatan awal bulan Kamariah. Namun sekali-kali tidak

boleh mendahului dari isbat pemerintah yang pada hakikatnya mempunyai otoritas untuk hal tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah yang secara khusus diwakilkan Kementerian Agama RI pada dasarnya memiliki kewenangan dalam melakukan isbat dan juga dalam hal penyelesaian perbedaan pendapat penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Kewenangan tersebut didapatkan berdasarkan analisis dalam aspek kewajiban pemimpin dalam hal pertikaian dan analisis ruang lingkup aplikasi ijtihad pemerintah. Kemudian, dalam hal metode penyelesaian sengketa perbedaan pendapat mengenai awal bulan yang dilakukan dengan benar secara bermusyawarah dan keputusan yang mengandung unsur *masalah mursalah*.
2. Penetapan awal bulan merupakan masalah di bidang *ijtihadiah*, maka wajar terjadi perbedaan pendapat. Namun ketika permasalahan tersebut telah diadopsi dan ditetapkan oleh pemerintah maka harus tetap mengikuti pemerintah. Karena pemerintah mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Organisasi-organisasi di luar pemerintah hanya sekedar mempunyai hak *ikhbar*, meskipun demikian hendaknya organisasi tersebut tidak boleh mendahului penetapan pemerintah. Kemudian, bagi

umat muslim yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad wajib mengikuti kepada pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Pemerintah yang notabene paling berwenang dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia melakukan sebuah pengkajian secara komprehensif terhadap kriteria-kriteria hisab rukyat. Dengan cara mengumpulkan ketua-ketua organisasi Islam, ahli-ahli astronom, lembaga-lembaga terkait sebagai bahan pertimbangan. Dan semua keperluan pengkajian tersebut setidaknya didanai secara penuh oleh pemerintah.
2. Ada baiknya pemerintah membatasi media agar tidak memperkeruh suasana dengan menyebarkan berita terkait perbedaan awal bulan Ramadan dan Lebaran. Hal ini dapat memberi ketertiban keamanan dan kedamaian sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Amri, Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional: Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas*, Semarang: LP2M, 2013
- Anshary, al-, Ibn Mandzur Jamaluddin, *Lisan al-Arabi*, Mesir: Darul Ma'arif, tt Juz XXVI
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*,. Cet.III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012,
- _____, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003
- Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010
- Badan Peradilan Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2007
- Budiardjo, Miriam, *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Bukhari, al-, *Sahih al-Bukhari*, Ttp.: Dar al-Fikr, 1994/1414, II:278-279, hadis no. 1990, “Kitab saum,” dari Ibnu Umar
- Direktorat Jendral Bimas Islam, Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syari'ah, *Keputusan Menteri Agama RI (1 Ramadhan, Syawal, dan Syawal)*, 2011
- Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama 2004, *“Selayang Pandang Hisab Rukyat”* Surat Keputusan No.64 Tahun 2003 Dirjen BIPH
- Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Ilmu Falak Praktis*, Sub Direktorat Pembinaan Syari'ah Dan Hisab Rukyat, Cet.1, Jakarta 2013
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2011

- Djazuli, A, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011
- Izzudin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007
- _____, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia; Sebuah Upaya Penyatuan Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003
- Jayusman, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusikamila Press Fak.Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung), Cet. Ke-2, 2014
- Kadir, A, *Cara Mudah menentukan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunnah dan Sains*, Semarang: Fatwa Publishing, 2014
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* , Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004
- _____, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005
- Lajnah Falakiyah, *Pedoman Hisab dan Rukyat Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006
- Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleena, 2009
- Mahfud M,D, *Politik Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Malik bin Anas bin Malik bin Amir, *Al-Mudawanah*, juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah
- Muhammad, Abi Abdillah bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992, Juz I
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Murtadho, Moh., *Ilmu Falak Praktis*, Cet.I, Malang: UIN Malang Press

- Muslim, *Sahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992/1412, I :468, “Kitab as-Siyam,” dari Ibnu Umar
- Muslim, Abi al-Husein Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1992, Juz 2
- Musonif, Ahmad, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Nawawi, al-, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf, *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz II
- Nurwendaya, Cecep, *Kaidah Kaidah Falakiyah dan Simulasi Hisab Rukyat*, (Manado: BHR Kementerian Agama RI), 2010
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*,. Cet. ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Putri, Hasna Tuddar, “*Redefinisi Hilal dalam Perspektif Fikih dan Astronomi dalam Al-Ahkam*, Volume 22, Nomor 1, April 2012
- Qhardhawi, Yusuf, “*Al-Siyasat Al-Syari'ah*”, diterjemahkan oleh Khatir Suhardi, “*Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*”, (Cet: I, Jakarta: Pustaka Kautsar: 1999
- _____, “*Min al-Fiqh al-Daulah Fi al-Islam*”, diterjemahkan oleh Khatir Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-sunnah*,. Cet. I, Pustaka al-Kautsar, 1997
- Rida, Syaikh Muhammad Rasyid, et.al., “*Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah*”, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual (dari Normatif ke pemaknaan Sosial)*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Bid'akah Ilmu Hisab?! Kajian tentang Ilmiah Polemik Hisab Rukyah Untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya*, Gresik : Pustaka Fuqon, 2011
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007
- Satriawan, M. Iwan dan Siti Khoiriah, “*Ilmu Negara*”, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016

Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010

Ulum, Miftahul, "*Ijtihad Ulama NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang Penetapan Awal JHGBulan Kamariah*", (journal stainata)

Wardan, Muhammad, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957

